



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN PERANGKAT DAERAH
(DPPA- SKPD)**

Nomor:

DPPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2024

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5 – Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
5 – Unsur Penunjang Urusan Pemerintah
Bidang Urusan : 5.01 – Perencanaan
5.05 – Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.42.000 – Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah

PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : Dr. Setiawan Aswad., M.Dev.Plg
NIP : 197308251992031002
JABATAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah



Provinsi Sulawesi Selatan

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran satuan kerja perangkat daerah:

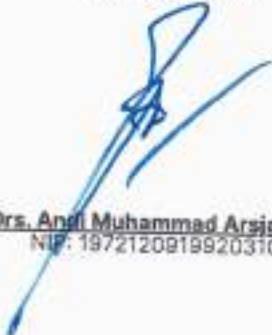
- a. Name : Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
b. NIP : 197308251992031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


Drs. Anas Muhammad Arsjad, M.Si
NIP: 197212091992031004

Makassar, Tanggal 06 Maret 2024
Disahkan oleh,
PPKD


Salehuddin S. Kom, M.Si
NIP: 197205042003121007



Provinsi Sulawesi Selatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 5 + UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN
: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

a. Nama : Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
b. NIP : 197308251992031002
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH


Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Makassar, Tanggal 06 Maret 2024
Pengguna Anggaran

Saifuddin S. Kom, M.Si
NIP: 197705042003121007

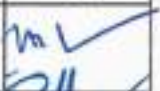



Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
NIP: 197308251992031002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor : DPPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2024					
Organisasi: 5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum	Setelah		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp30.000.000	Rp30.000.000		Rp0
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp30.000.000	Rp30.000.000		Rp0
5 1	BELANJA OPERASI	Rp52.157.815.292	Rp52.707.567.568		Rp549.752.276
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp30.234.108.667	Rp28.852.496.943		(Rp1.381.611.724)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.923.706.625	Rp23.855.070.625		Rp1.931.364.000
5 2	BELANJA MODAL	Rp793.933.000	Rp948.783.000		Rp154.850.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp793.933.000	Rp793.933.000		Rp0
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp0	Rp154.850.000		Rp154.850.000
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		<p>Makassar, Tanggal 06 Maret 2024 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p>  Dr. Setiawan Aswad, M.Dev,Plg NIP. 197306251992031002	
Januari	Rp2.200.000	Januari	Rp11.804.397.125		
Februari	Rp2.200.000	Februari	Rp0		
Maret	Rp2.200.000	Maret	Rp0		
April	Rp2.600.000	April	Rp13.950.651.148		
Mei	Rp2.600.000	Mei	Rp0		
Juni	Rp2.600.000	Juni	Rp0		
Juli	Rp2.200.000	Juli	Rp11.804.397.125		
Agustus	Rp2.200.000	Agustus	Rp0		
September	Rp2.200.000	September	Rp0		
Oktober	Rp3.000.000	Oktober	Rp16.096.905.170		
November	Rp3.000.000	November	Rp0		
Desember	Rp3.000.000	Desember	Rp0		
Jumlah	Rp30.000.000	Jumlah	Rp53.656.350.568		

Mengesahkan,

Salehuddin S. Kom, M.Si
NIP. 197205042003121007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Setiawan Aswad, M. Dev.Plg	197308251992031002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Salehuddin, S.Kom., M.Si	197705042003121007	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Kasman, S.Hut., M.M	198410292005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
4.	Bustanul Arifin, SH., MM	198511112010011023	Kepala Biro Organisasi	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 269 Telepon (0411) 453202
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR 900/1647/III/BKAD
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 900/022/I/BKAD TENTANG PENGESAHAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 900/022/I/BKAD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5,
34. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 332);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 335);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja dan Personil Lainnya (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 18) sebagaimana telah diubah

41. dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 52);
42. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 46);
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 42);
44. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
45. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

46. Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
47. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahum 2014, Tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1/I/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 900/022/1/BKAD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA.

KEDUA : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. URUSAN : PERENCANAAN
2. ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

3. PENDAPATAN	:	Rp.	30.000.000,00
4. BELANJA :			
a. Belanja Operasi	:	Rp.	52.157.815.292,00
Bertambah	:	Rp.	549.752.276,00
b. Belanja Modal	:	Rp.	793.933.000,00
Bertambah	:	Rp.	154.850.000,00

Jumlah	:	Rp.	53.656.350.568,00

- KETIGA** : Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan mempedomani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Disahkan di Makassar

Pada tanggal, 13 maret 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH


SALEHUDDIN, S.Kom., M.Si

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP:19770504 200312 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPPA - PENDAPATAN SKPD
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor	: DPPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2024	
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan			Tarif/Harga
5.01.5.05.0.00.42.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Rp30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Rp30.000.000	Rp0
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp30.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp30.000.000	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp30.000.000	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp30.000.000	Retribusi Daerah				Rp30.000.000	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp30.000.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp30.000.000	Rp0
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp30.000.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp30.000.000	Rp0
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp15.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp15.000.000	Rp0
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp15.000.000	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp15.000.000	Rp0
	::: Sewa Kantin				Rp15.000.000	::: Sewa Kantin				Rp15.000.000	Rp0
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.000.000	Rp0

Kode Rekening	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan			Tarif/Harga
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang				Rp15.000.000	Retribusi Pemakaian Ruang				Rp15.000.000	Rp0
	:: Retribusi Pemakaian Ruang				Rp15.000.000	:: Retribusi Pemakaian Ruang				Rp15.000.000	Rp0
	::: Sewa Mess/Aula				Rp15.000.000	::: Sewa Mess/Aula				Rp15.000.000	Rp0
	Retribusi Pemakalan Ruang	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.000.000	Retribusi Pemakaian Ruang	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.000.000	Rp0
		Jumlah			Rp30.000.000		Jumlah			Rp30.000.000	

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp2.200.000
Februari	Rp2.200.000
Maret	Rp2.200.000
April	Rp2.800.000
Mei	Rp2.800.000
Juni	Rp2.800.000
Juli	Rp2.200.000
Agustus	Rp2.200.000
September	Rp2.200.000
Oktober	Rp3.000.000
November	Rp3.000.000
Desember	Rp3.000.000
Jumlah	Rp30.000.000


Makassar, Tanggal 06 Maret 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
NIP. 197308251992031002

Mengesahkan,
PPKD


Salehuudin, S.Kom., M.Si
NIP. 497705042003121007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Salehuudin, S.Kom., M.Si	197705042003121007	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

2	Dr. H. Reza Faizal Saleh, S.STP., M.Si	198203062000121001	Kepala Badan Pendapatan Daerah	<i>Reza Faizal</i>
---	--	--------------------	--------------------------------	--------------------

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA - BELAJAR
SKPD

Nomor DPA : 1.DPAJA.15.01.5.05.0.00.42.000050/2024
SKPD : 1.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Subsistem Dokumen Pelaksanaan Anggaran Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Jumlah

Urutan	Balok Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Label	Tabel										Saldo Awal Berimbang	T+1
								Subsistem					Sistem						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terealisasi	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terealisasi	Belanja Transfer	Jumlah		
1.01.5.05.0.00.42.0000 - BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								Rp32.757.015.582	Rp789.893.000	Rp0	Rp0	Rp32.991.368.282	Rp32.707.907.588	Rp848.783.000	Rp0	Rp0	Rp33.898.290.588	Rp704.892.276	
LEMBUR PENKULJANG URSUAN PEMERINTAHAN								Rp32.757.015.582	Rp789.893.000	Rp0	Rp0	Rp32.991.368.282	Rp32.707.907.588	Rp848.783.000	Rp0	Rp0	Rp33.898.290.588	Rp704.892.276	
PEMBANGUNAN								Rp48.878.875.292	Rp789.893.000	Rp0	Rp0	Rp49.672.748.292	Rp48.916.303.599	Rp848.783.000	Rp0	Rp0	Rp49.998.193.599	(Rp434.811.724)	
PROGRAM PERKULJANG URSUAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								Rp42.681.478.142	Rp789.893.000	Rp0	Rp0	Rp43.475.471.142	Rp42.788.888.418	Rp848.783.000	Rp0	Rp0	Rp43.649.418	(Rp101.881.724)	
Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Rp398.881.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp398.881.700	Rp398.881.700	Rp0	Rp0	Rp398.881.700	Rp0		
Peningkatan Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah								Rp181.502.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.502.700	Rp181.502.700	Rp0	Rp0	Rp181.502.700	Rp0		
Koordinasi dan Pengawasan DPA-SKPD								Rp138.782.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp138.782.500	Rp138.782.500	Rp0	Rp0	Rp138.782.500	Rp0		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Rp278.888.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp278.888.500	Rp278.888.500	Rp0	Rp0	Rp278.888.500	Rp0		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Rp0.888.232.587	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0.888.232.587	Rp0.888.232.587	Rp0	Rp0	Rp0.888.232.587	(Rp1.381.811.724)		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Rp30.334.908.887	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.334.908.887	Rp30.334.908.887	Rp0	Rp0	Rp30.334.908.887	(Rp1.381.811.724)		
Pelaksanaan Penyelesaian dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								Rp74.823.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.823.000	Rp74.823.000	Rp0	Rp0	Rp74.823.000	Rp0		
Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Rp58.112.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.112.000	Rp58.112.000	Rp0	Rp0	Rp58.112.000	Rp0		
Pengelolaan dan Pengawasan Bahan Tunggal/Perawatan								Rp32.788.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.788.500	Rp32.788.500	Rp0	Rp0	Rp32.788.500	Rp0		
Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan/ Saluran/ Titik-titik/Semesteran SKPD								Rp271.820.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp271.820.000	Rp271.820.000	Rp0	Rp0	Rp271.820.000	Rp0		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								Rp141.207.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp141.207.400	Rp141.207.400	Rp0	Rp0	Rp141.207.400	Rp0		
Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Barang Milik Daerah SKPD								Rp21.148.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.148.200	Rp21.148.200	Rp0	Rp0	Rp21.148.200	Rp0		

Urutan	Masing Urutan	Program	Kejelasan	Berkas	Uraian	Sumbah Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah Berkurang	T+1				
								Tahun															
								Belakang					Sebelum										
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertaga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertaga	Belanja Transfer	Jumlah						
						(PAD)	Kabupaten/Desa																
5	01	01	1.03	0025	Rasionalisasi dan Penyusunan Laporan Berang MBK Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp21.857.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.857.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.857.400		Rp0
5	01	01	1.03	0028	Penilaian Kinerja Berang MBK Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp66.201.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.201.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.201.800		Rp0
5	01	01	1.08		Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah							Rp406.402.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp406.402.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp406.402.700		Rp0
5	01	01	1.05	0000	Pengadaan Pakan Oliva Beserta Akibat Kelangkaannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp111.150.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.150.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.150.000		Rp0
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengisian Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp127.321.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp127.321.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp127.321.000		Rp0
5	01	01	1.03	0029	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp85.850.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp85.850.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp85.850.100		Rp0
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Perubahan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp82.081.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp82.081.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp82.081.800		Rp0
5	01	01	1.08		Administratif Urusan Perangkat Daerah							Rp4.255.877.087	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.255.877.087	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.255.877.087		Rp0.000.000
5	01	01	1.08	0000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp157.722.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp157.722.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp157.722.800		Rp0
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp591.889.587	Rp0	Rp0	Rp0	Rp591.889.587	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp591.889.587		Rp0
5	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Bahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp60.226.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.226.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.226.800		Rp0
5	01	01	1.06	0038	Facilitas Kegiatan Tim	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp321.841.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp321.841.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp321.841.700		Rp0
5	01	01	1.08	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp3.091.889.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.091.889.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.091.889.800		Rp0.000.000
5	01	01	1.08	0010	Penelitian dan Analisis Kinerja pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa					Rp42.500.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp42.500.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp42.500.800		Rp0
5	01	01	1.07		Pengelolaan Berang MBK Daerah Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah							Rp758.104.800	Rp700.833.000	Rp0	Rp0	Rp1.012.033.800	Rp258.104.800	Rp460.785.000	Rp0	Rp0	Rp1.208.899.800		Rp184.896.000

Urutan	Klasifikasi Urutan	Program	Kategori	Sub-kategori	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah Berkurang	T+1				
								Tahun																
								Saluran					Detail											
								Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
						(PAD)	Kabupaten/Desa																	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pematangan Data dan Informasi Pemantauan Pembangunan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp70.387.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.387.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.387.700			Rp0
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp72.586.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.586.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.586.400			Rp0
8	01	03	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemantauan Pembangunan Daerah							Rp1.252.411.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.252.411.900	Rp1.480.717.990	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.480.717.990			Rp208.306.090
8	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengembangan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp175.432.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp175.432.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp175.432.800			Rp0
8	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp716.984.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp716.984.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp716.984.750			Rp0
8	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/evaluasi Cobakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp980.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp980.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp980.000.000			Rp0
8	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							Rp72.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.180.000			Rp0
8	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp72.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.180.000			Rp0
8	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							Rp3.214.842.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.214.842.200	Rp3.361.747.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.361.747.200			Rp146.905.000
8	01	00	1.01		Evaluasi Pemantauan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Monev							Rp1.023.044.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.023.044.200	Rp1.050.844.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.050.844.200			Rp28.800.000
8	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp74.985.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.985.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.985.400			Rp0
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp158.604.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp158.604.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp158.604.000			Rp0
8	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp43.314.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.314.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.314.700			Rp0
8	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Monev (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp271.505.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp271.505.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp271.505.400			Rp0
8	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Monev	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					Rp137.382.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp137.382.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp137.382.200			Rp0

Urutan	Masing Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokal	Jumlah										Berkas Berkas	T+1
								Tahun											
								Saluran					Saluran						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tetap	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tetap	Belanja Transfer	Jumlah		
5	01	03	1.01	0028	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp257.222.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp257.222.500	Rp274.022.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp274.022.500	Rp04.808.000	
6	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)			Rp1.091.948.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.091.948.000	Rp1.091.948.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.091.948.000	Rp0	
7	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (SRUPD, RPUMD dan RPDC)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp88.748.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp88.748.400	Rp99.768.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.768.400	Rp0	
8	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp126.080.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp126.080.400	Rp126.080.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp126.080.400	Rp0	
9	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp383.208.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp383.208.200	Rp383.208.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp383.208.200	Rp0	
10	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (SRUPD, RPUMD dan RPDC)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp198.670.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp198.670.100	Rp198.670.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp198.670.100	Rp0	
11	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp158.287.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp158.287.700	Rp158.287.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp158.287.700	Rp0	
12	01	03	1.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp237.851.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp237.851.200	Rp237.851.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp237.851.200	Rp0	
13	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Rp1.199.957.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.199.957.000	Rp1.199.957.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.199.957.000	Rp0	
14	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (SRUPD, RPUMD dan RPDC)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp138.913.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp138.913.000	Rp138.913.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp138.913.000	Rp0	
15	01	03	1.03	0002	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp140.390.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp140.390.000	Rp140.390.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp140.390.000	Rp0	
16	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp372.145.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp372.145.800	Rp372.145.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp372.145.800	Rp0	
17	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (SRUPD, RPUMD dan RPDC)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp170.800.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.800.800	Rp170.800.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.800.800	Rp0	
18	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai Kab/Kota, Sesuai Kecamatan, Sesuai Kelurahan/Desa	Rp177.508.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp177.508.000	Rp177.508.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp177.508.000	Rp0	

Jumlah

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Berkas/ Berkas	T+1	
								Tahun												
								Sebelum					Setelah							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terutang	Belanja Transfer	Jumlah			
1	01	03	1.03	0308	Konektivitas Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp189.266.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp189.266.400	Rp189.266.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp189.266.400		Rp0
5	06				PELITIAN DAN PEMBINAAN			Rp2.478.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.478.000.000	Rp2.766.214.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.766.214.000		Rp1.306.214.000	
5	08	02			PROGRAM PELITIAN DAN PEMBINAAN DAERAH			Rp2.478.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.478.000.000	Rp2.766.214.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.766.214.000		Rp1.306.214.000	
5	05	03	1.01		Peralihan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penghajian Perawatan			Rp429.125.208	Rp0	Rp0	Rp0	Rp429.125.208	Rp1.399.125.208	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.399.125.208		Rp480.000.000	
5	05	02	1.01	0001	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Fasilitas dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp242.242.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp242.242.100	Rp242.242.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp242.242.100		Rp0
5	05	03	1.01	0002	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Fasilitas dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.888.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp88.888.100	Rp88.888.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp88.888.100		Rp380.000.000
5	05	02	1.01	0004	Facilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Penghajian Perawatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp130.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp130.000.000		Rp130.000.000	
5	06	03	1.03		Peralihan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependidikan			Rp33.008.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.008.800	Rp373.008.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp373.008.800		Rp340.000.000	
5	05	03	1.02	0001	Peralihan dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp133.008.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp133.008.800	Rp233.008.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp233.008.800		Rp100.000.000
5	05	03	1.02	0006	Peralihan dan Pengembangan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000		Rp130.000.000	
5	06	02	1.03		Peralihan dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pembangunan			Rp47.888.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.888.000	Rp1.197.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.197.100.000		Rp339.214.000	
5	05	02	1.03	0004	Peralihan dan Pengembangan Perairan, Perkabupaten dan Perairan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp233.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp233.800.000	Rp655.018.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp655.018.200		Rp419.214.000
5	05	02	1.03	0005	Peralihan dan Pengembangan Selektif dan Perikanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp215.885.208	Rp0	Rp0	Rp0	Rp215.885.208	Rp215.885.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp215.885.200		Rp0
5	04	03	1.03	0007	Peralihan dan Pengembangan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp166.400.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp166.400.800	Rp416.400.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp416.400.800		Rp120.000.000
5	06	02	1.04		Pengembangan Inisiatif dan Teknologi			Rp118.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp118.000.000	Rp889.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp889.000.000		Rp90.000.000	
5	05	02	1.04	0001	Peralihan, Pengembangan, dan Peningkatan di Bidang Teknologi dan Inisiatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp218.994.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp218.994.300	Rp789.994.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp789.994.300		Rp50.000.000
5	05	02	1.04	0003	Optimalisasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp293.016.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp293.016.800	Rp293.016.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp293.016.800		Rp0

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah Berkurang	T+			
								Tahun														
								Debet					Kredit									
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tanggung	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tanggung	Belanja Transfer	Jumlah					
1	01	02	104	0004	Sustentabel dan Dinamisasi Hasil-Hasil Kelibangan	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2	05	02	104	0005	Fasilitas Hak Kebayoran Intelektual	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Bersama Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp11.804.393.025
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp12.850.661.144
Mai	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp11.804.393.025
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp16.086.905.170
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp43.896.399.899

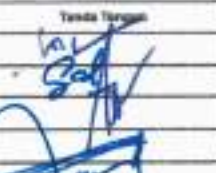
Melaksanakan Tanggal 08 Mei 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGELOMPOKAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


Dr. Setiawan Arwani, M. Des. Pdg
NIP. 197106021980031000

Mengesahkan

Setiawan Arwani, M. Des. Pdg
NIP. 197106021980031000

Daftar Anggaran Penerimaan Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Setiawan Arwani, M. Des. Pdg	197106021980031000	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Persebaran dan Pengembangan Daerah	
2.	Setiawan, S. Kom., M. Si	197103042001120007	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Arwani, S. Ht., M. M.	198402222003021001	Kepala Rku Pengadaan Barang dan Jasa	
4.	Sustardi Arifin, D.L., M.P.	1985111707061003	Kepala Div. Organisasi	